



DETERMINAN YANG MEMENGARUHI PERUBAHAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Nurul Diah Utami¹ Rohmad Yuliantoro Catur Wibowo²

Article history:

Submitted: 14 April 2025

Revised: 13 Mei 2025

Accepted: 10 Juni 2025

Keywords:

Accumulation Surplus;

Financial Autonomy;

Re-Budgeting;

SILPA;

Variance Expenditure;

Kata Kunci:

Akumulasi Surplus;

Otonomi Keuangan;

Perubahan Anggaran;

SILPA;

Varians Anggaran Belanja;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ahmad Dahlan,

Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

Email:

nutadiah1204@gmail.com

Abstract

Poverty is a challenge that must be resolved. Local government have a fully responsibility for financial management to provide the best services of facilities and necessities that can support daily needs in order to improve community welfare and alleviate poverty. The purpose of this research was to examine rebudgeting in social assistance expenditure that were influenced by financial autonomy, SiLPA, accumulated surplus and variance expenditure partially and simultaneously. The population of this research were regency/city in the provinces of Central Java and Yogyakarta Special Region in 2019-2023 with sampling techniques used was purposive sampling based on predetermined criteria, resulting 175 data. The data used are secondary data from of Statement of Budget Realization sourced from the website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and analyzed using the EViews 12 program. Regression analysis of this research indicates that are financial autonomy and SiLPA has no effect on social assistance expenditure rebudgeting. While accumulation surplus and variance expenditure has effect on social assistance expenditure rebudgeting.

Abstrak

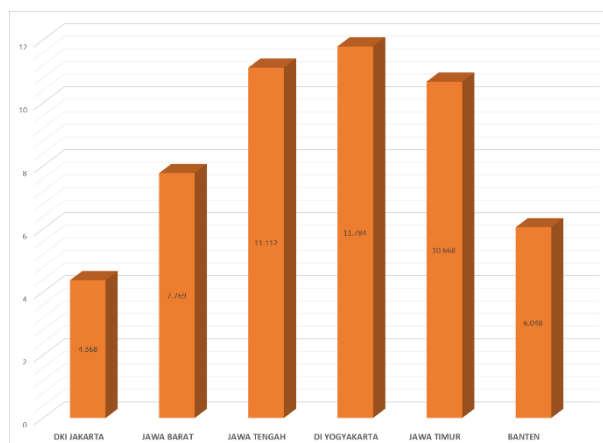
Kemiskinan merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah bertanggungjawab secara penuh dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan terbaik berupa fasilitas dan kebutuhan yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Tujuan penelitian untuk menguji perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dipengaruhi otonomi keuangan, SiLPA, akumulasi surplus serta varians anggaran belanja secara parsial dan simultan. Populasi penelitian ini merupakan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta rentang waktu 2019-2023 dengan sampel yang ditentukan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menghasilkan 175 data. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari website Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan (DJPK) dan dianalisis menggunakan program *EViews 12*. Analisis regresi pada penelitian menunjukkan otonomi keuangan dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Sedangkan akumulasi surplus dan varians anggaran belanja berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia²

Email: rohmayuliantoro@act.uad.ac.id

PENDAHULUAN

Pulau Jawa merupakan pulau dengan distribusi kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yakni sebesar 56,1 persen (Rainer, 2023). Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh adanya kepadatan penduduk adalah kemiskinan. Di pulau Jawa, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, seperti yang terlihat pada Gambar 1 selanjutnya diikuti oleh provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan menjadi masalah serius yang harus diatasi. Keseriusan dalam menanggapi kemiskinan didasari karena adanya dampak yang sangat besar di bidang ekonomi dan semua aspek kehidupan (Florennica & Febriani, 2023). Kemiskinan harus dipandang sebagai masalah multidimensi dengan penanggulangan jangka panjang dan berkelanjutan (Zhang *et al.*, 2024). Artinya, penanggulangan kemiskinan tidak cukup dengan solusi instan dalam waktu singkat melainkan solusi jangka panjang. Penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari jumlah pengeluaran (belanja) daerah (Supratiyoningsih & Yuliarmi, 2022). Akan tetapi, mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, karena terbatasnya fleksibilitas anggaran dan munculnya kebutuhan yang tidak terencana (Indiahono & Satyawan, 2023).



Sumber: BPS (2024)

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin (2019-2023)

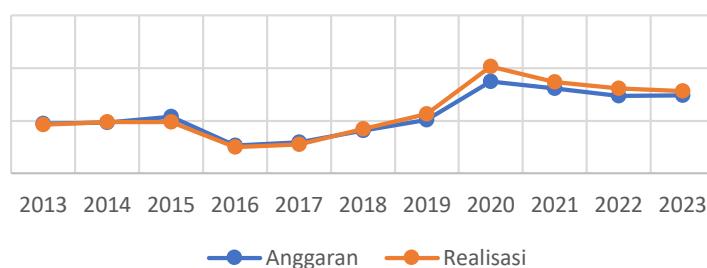
Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan bangsa dan digunakan dalam rangka meringankan tugas pemerintah pusat dengan pemerataan tanggung jawab (Ningsih *et al.*, 2023). Dalam sistem otonomi daerah pengelolaan keuangan diwujudkan dengan kebijakan otonomi keuangan dengan pemberian wewenang terhadap pemerintah daerah agar mengatur keuangannya sendiri. Penganggaran melibatkan penyusunan rencana program kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, umumnya dalam periode satu tahun anggaran (Dongi *et al.*, 2024). Penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang harus diatur secara tepat dan teliti oleh pemerintah daerah dengan mengutamakan ketercapaian tujuan agar penggunaan anggaran dilaksanakan secara optimal (Ratifah & Nuraeni, 2021).

Pengelolaan keuangan menjadi pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik berupa fasilitas dan kebutuhan masyarakat yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencegah atau mengurangi kemiskinan setiap negara memiliki inisiatif dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan sosialnya sendiri (Uğurlu, 2024). Indonesia, pemerintah melakukan upaya yang mencakup strategi dalam menyejahterakan masyarakat berkaitan dengan kebijakan sosial melalui penyaluran bantuan sosial (Prasetyo *et al.*, 2024). Bantuan sosial merupakan salah satu *pro poor program* sebagai upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Wardhana *et al.*, 2022). Dilakukannya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok, pengurangan kesenjangan sosial

ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat pada kondisi rentan (Saksono, 2021). Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah bukanlah sesuatu yang baru dari kegiatan rutin untuk mengentaskan kemiskinan hingga dalam situasi bencana, bantuan sosial selalu diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Rahmansyah *et al.*, 2020).

Penyaluran bantuan sosial menjadi langkah utama dalam penanggulangan kemiskinan. Prasetyo *et al.* (2023) melakukan penelitian penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah berdasarkan 4 strategi yaitu pengeluaran beban hidup, meningkatkan pendapatan dan penanganan kantong kemiskinan. Sebesar 55,05 persen anggaran penanggulangan kemiskinan tersebut digunakan untuk mengurangi beban pengeluaran yang dituangkan dalam bentuk bantuan sosial, hibah dan perlindungan sosial. Sedangkan di wilayah DIY menurut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (2024) penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi dua program yakni program untuk pengurangan tekanan biaya hidup kelompok miskin ekstrim yang diimplementasikan dalam bantuan sosial dan subsidi, serta program pemberdayaan sebagai upaya peningkatan produktivitas kapasitas ekonomi.

Anggaran bersifat dinamis artinya merupakan akan menyesuaikan antara pengeluaran dengan rencana pencapaian tujuan (Rachmadani *et al.*, 2024). Anggaran akan menilai seberapa sumber daya yang dialokasikan untuk pencapaian tujuan dalam kebijakan yang berdampak sosial (Stratan & Manole, 2017). Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran yang efektif dapat menjamin bahwa program kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik (Dongi *et al.*, 2024). Penyusunan anggaran harus dipertimbangkan dengan kondisi realita dan di masa depan sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (Febriaty *et al.*, 2024). Proses penyusunan anggaran dimulai penganggaran dengan menetapkan besaran nominal hingga realisasi tidak selalu berjalan sesuai rencana, salah satunya perubahan anggaran. Perubahan anggaran terjadi karena adanya proses penyesuaian antara kejadian yang sebenarnya dengan kemampuan finansial. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan dilakukannya perubahan anggaran yang pemerintah lakukan melalui penyesuaian anggaran yang menggambarkan adanya perubahan kebijakan anggaran pemerintah.



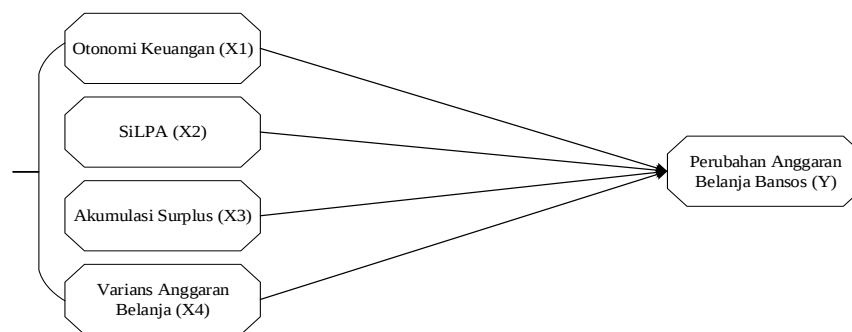
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial (2013-2023)

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI gambar 1 menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial mengalami fluktuasi pada anggaran maupun realisasinya tahun 2013-2023. Tahun 2020 belanja bantuan sosial berada dalam titik tertinggi selama periode 2013-2023 yang diakibatkan oleh pemerintah dalam merespon dampak *Covid-19* membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan perluasan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan kebijakan tersebut prioritas menjadi komponen penting, anggaran mana yang harus ditambahkan dan harus dikurang mengingat adanya kegiatan yang dihapuskan dari program kerja dan direalokasikan di periode selanjutnya (Nabilla *et al.*, 2022). Perubahan anggaran yang terjadi harus dipertimbangkan oleh pemerintah darimana saja sumber anggaran yang dapat digunakan untuk menambahkan atau menutupi anggaran pada perubahan.

Studi sebelumnya mengungkapkan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh otonomi keuangan, akumulasi surplus dan SiLPA (Putra & Arza, 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena belum terdapat kajian spesifik mengkaji pengaruh

varians anggaran belanja terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial, khususnya di wilayah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2023.



Sumber: Data Penelitian, 2025

Gambar 3. Model Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan yaitu perjanjian antara kedua belah pihak dengan satu pihak sebagai pemberi mandat (prinsipal) dan penerima mandat (agen) (Putra & Arza, 2023). Hubungan tersebut menjadikan agen harus mempertanggungjawabkan atas wewenang yang telah diberikan oleh prinsipal dimulai dari penyusunan anggaran hingga perubahan anggaran bila terjadi. Agen berperan untuk memprioritaskan pencapaian tujuan dengan menetapkan skema agar dapat memberikan pelayanan yang baik atas penggunaan anggaran sedangkan prinsipal berperan sebagai pengawas dalam perjalanan penggunaan anggaran apakah efektif dan efisien (Ratifah & Nuraeni, 2021).

Pemberian pemerintah daerah kekuasaan untuk mengatur keuangan dan sumber daya daerahnya merupakan konsep dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam teori keagenan pemerintah daerah sebagai agen menjalankan wewenang atas pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dengan mengumpulkan pendapatan dan mengatur pengeluaran daerahnya. Pemerintah daerah dengan PAD yang lebih tinggi cenderung memiliki infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian, perencanaan dan penyusunan anggaran akan tepat sasaran dan lebih sedikit anggaran ulang yang dilakukan pada tahun berjalan.

Otonomi keuangan memengaruhi perubahan anggaran belanja seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Arza (2023) sejalan dengan temuan Fernando dan Sari (2022). Otonomi keuangan mencerminkan kemandirian fiskal yang ditandai dengan besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Menurut Widyaningrum *et al.* (2019) semakin tinggi PAD maka satu daerah memiliki infrastruktur dan SDM yang baik sehingga optimalnya perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan. Pemerintah daerah berkesempatan merencanakan strategi ekonomi yang tepat sesuai kapasitas serta kemampuan yang dimiliki daerah (Nasution, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi keuangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial yang dilakukan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingginya otonomi keuangan. Semakin tinggi nilai otonomi keuangan, semakin besar juga nilai perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal ini menjadi dasar hipotesis pertama pada penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H₁: Otonomi keuangan berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dengan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Nilai SiLPA tahun berjalan bersifat prediksi dan terbentuk ketika adanya sisa lebih dari suatu pengeluaran. Pada teori keagenan pemerintah pusat sebagai prinsipal mengharapkan dalam penggunaan

anggaran dilakukan secara efektif dan efisien, sedangkan agen yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran sesuai dengan rencana.

Hasil penelitian dari Putra dan Arza (2023) dan Rafli dan Sari (2021) menunjukkan perubahan anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh SiLPA. Hasil tersebut selaras dengan pandangan Rizqiyati *et al.*, (2019) dan Ramadhan *et al.* (2021) yang mengungkapkan nilai SiLPA sebagai pilihan pendanaan yang penting untuk belanja tahun berikutnya dengan menetapkan besaran nilai SiLPA pada tahun berjalan yang dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya. Tingginya SiLPA pada tahun sebelumnya mendorong nilai anggaran belanja bantuan sosial untuk tahun berikutnya yang digunakan sebagai upaya memaksimalkan kegiatan guna pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai SiLPA pada tahun berjalan bukan hanya dianggap sebagai sisa dana, akan tetapi dapat digunakan sebagai pengalokasian kembali program belanja bantuan sosial di tahun berikutnya. Pemanfaatan SiLPA akan mendorong dalam upaya pemerataan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini menjadi dasar hipotesis kedua penelitian ini, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H₂: SiLPA berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Adanya jumlah realisasi SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya membentuk akumulasi surplus. Dalam konsep keagenan, prinsipal sebagai pemberi mandat mengharapkan penggunaan surplus agar memberikan manfaatnya secara langsung untuk menunjukkan efisiensi, sedangkan agen sebagai penerima mandat beranggapan tidak menggunakan surplus sepenuhnya dengan alasan mencadangkan sebagai upaya antisipasi kebutuhan anggaran yang mendesak di masa depan.

Hasil kajian Putra dan Arza (2023) mengungkapkan bahwa akumulasi surplus menjadi salah satu alternatif untuk menutupi dana dari adanya perubahan anggaran. Hal tersebut selaras dengan Fernando dan Sari (2022) surplus yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya pada saat membuat anggaran akan membutuhkan perubahan anggaran dan menjadikan salah satu faktor perubahan anggaran yang terjadi. Nilai surplus yang terakumulasi dapat dijadikan dasar melakukan perubahan dalam alokasi anggaran belanja (Novelsyah *et al.*, 2022). Akumulasi surplus berbanding lurus dengan perubahan anggaran, besarnya perubahan alokasi anggaran cenderung akan meningkat seiring meningkatnya akumulasi surplus.

Berdasarkan penjelasan diatas, akumulasi surplus memiliki peran yang penting dalam faktor perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Akumulasi surplus yang ada dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas daerah yaitu bantuan sosial. Pemanfaatan akumulasi surplus menunjukkan respons dari pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini menjadi dasar hipotesis ketiga penelitian ini, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H₃: Akumulasi surplus berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Adanya realisasi belanja kurang dibandingkan dengan anggaran akan menyebabkan terjadinya varians anggaran belanja. Pada teori keagenan, varians anggaran bisa saja terjadi ketika agen tidak memaksimalkan penyalurannya secara efektif yang disebabkan kehati-hatian yang berlebih dengan menetapkan realisasi di bawah anggaran. Dikatakan *favourable variance* menandakan bahwa anggaran efisien sedangkan *unfavourable variance* menandakan inefisiensi karena prediksi belanja yang kurang tepat (Afifah & Adnan, 2022). Penyebab terjadinya varians dapat ditelusuri terperinci dengan melakukan analisis varians (Niansyah & Biswan, 2018) dan ukurannya dapat diketahui setelah realisasi anggaran (Junita *et al.*, 2018). Riset yang ditemukan Novelsyah *et al.* (2022) menunjukkan adanya surplus akibat realisasi belanja di bawah anggaran membuat pemerintah mempertimbangkan penetapan anggaran di awal tahun. Varians anggaran belanja pada tahun lalu dapat digunakan pada tahun berjalan dengan menentukan sumber pendapatan dan rencana pengalokasian dalam pengeluaran maka harus dilakukan perubahan anggaran (Junita *et al.*, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, varians anggaran belanja bukan hanya sebagai pembangking antara anggaran dengan realisasi, juga sebagai prediktor dalam menentukan perubahan anggaran pada tahun

berjalan dengan melihat varians anggaran belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi dasar hipotesis keempat penelitian ini, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

H_4 = Varians anggaran belanja berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Terjadinya kegiatan darurat penyebab perubahan anggaran dapat dilakukan realokasi anggaran (Kuntadi & Damayantie, 2022). Anggaran belanja sudah berdasarkan alokasi dana dalam DIPA, jika terjadi kondisi mendesak atau tidak dapat ditunda maka pemerintah daerah akan melakukan perubahan anggaran untuk memprioritaskan pada kondisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan anggaran belanja bantuan sosial secara parsial dan simultan. Penelitian bersifat kuantitatif, data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2023 yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Populasi penelitian meliputi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang tidak memiliki nilai SiLPA dan belanja bantuan sosial bernilai 0 ataupun negatif baik pada anggaran maupun realisasi pada tahun 2019-2023. Jumlah keseluruhan sampel yang digunakan yaitu 175 data.

Pengolahan data menggunakan bantuan program *EViews 12*. Dalam menentukan teknik estimasi regresi data panel, menurut Widarjono (2005) dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier. Tahapan analisis dilanjutkan pengujian asumsi klasik setelah penentuan model regresi tepat. Jika telah terpenuhi maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis melalui uji t, uji F serta analisis koefisien determinasi (R^2).

Definisi Operasional:

Otonomi Keuangan	: PAD / Pendapatan Daerah
SiLPA	: (SiLPA Realisasi – SiLPA Anggaran) / SiLPA Anggaran
Akumulasi Surplus	: (SiLPA tahun sebelumnya + SiLPA tahun berjalan) / Realisasi pendapatan tahun berjalan
Varians Anggaran Belanja	: ((Realisasi belanja t-1) – (Anggaran belanja t-1)) / Realisasi belanja tahun berjalan

Perubahan Anggaran Bantuan sosial : (Anggaran realisasi – Anggaran awal) / Anggaran awal

Secara matematis persamaan regresi linear berganda yang digunakan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Perubahan anggaran belanja bantuan sosial
$X1$	: Otonomi keuangan
$X2$	: SiLPA
$X3$	: Akumulasi surplus
$X4$	: Varians anggaran belanja
α	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: Koefisien Regresi
E	: Standar Error
t	: <i>Time Series</i> (tahun pengamatan)
i	: <i>Cross Section</i> (Kabupaten/kota)

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1.**
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	175	0,09	0,29	0,15	0,04
Otonomi Keuangan (X1)	175	-1,72	0,88	0,33	0,39
SiLPA (X2)	175	0,05	0,30	0,15	0,05
Akumulasi Surplus (X3)	175	-0,25	0,15	-0,04	0,06
Varians Anggaran Belanja (X4)	175	-1,87	1,06	-0,12	0,52

Sumber: Data Diolah, 2025

Statistik deskriptif yang dilampirkan pada tabel 1 dalam analisis yaitu otonomi keuangan, SiLPA, akumulasi surplus dan varians anggaran belanja di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan periode 2019-2023, jumlah masing-masing observasi yang digunakan pada penelitian sebanyak 175.

Tabel 2.
Uji Model

Effects Test	Prob.	Model Terpilih
Uji Chow	0,013	FEM
Uji Hausman	0,041	FEM
Uji LM	0,577	CEM

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel 2, *Fixed Effect* menjadi model terpilih dalam penelitian ini. Setelah model terpilih, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Asumsi klasik pendekatan OLS tidak semua dilakukan, melainkan hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2015).

Tabel 3.
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
Otonomi Keuangan (X1)	1,000	-0,059	0,324	-0,238
SiLPA (X2)	-0,059	1,000	0,308	0,017
Akumulasi Surplus (X3)	0,324	0,309	1,000	0,043
Varians Anggaran Belanja (X4)	-0,238	0,017	0,043	1,000

Sumber: Data Diolah, 2025

Multikolinearitas terjadi ketika nilai R kuadrat lebih dari 0,8 (Basuki & Yuliadi, 2015). Merujuk pada tabel 5 besaran dari koefisien korelasi antar variabel $< 0,8$ artinya semua variabel independen lolos multikolinearitas.

Tabel 4.
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1,478	Prob. F(4,170)	0,211
Obs*R-squared	5,880	Prob. Chi-Square(4)	0,208
Scaled explained SS	8,952	Prob. Chi-Square(4)	0,062

Sumber: Data Diolah, 2025

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui kestabilan varians dari model dan dikatakan baik jika memiliki residual yang konstan (Iqbal, 2015). Terindikasi heteroskedastisitas ketika nilai probability < 0,05 (Sihombing, 2022). Pada tabel 6 terlihat nilai probabilitas sebesar 0,2083 > 0,05 menunjukkan variabel independen terbebas gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5.
Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,490	0,577	-2,582	0,011
Otonomi Keuangan (X1)	5,77	3,877	1,489	0,139
SiLPA (X2)	0,193	0,123	1,562	0,121
Akumulasi Surplus (X3)	3,447	1,556	2,216	0,028
Varians Anggaran Belanja (X4)	1,741	0,742	2,347	0,020
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0,305	Mean dependent var		-0,116
Adjusted R-squared	0,111	S.D. dependent var		0,516
S.E. of regression	0,487	Akaike info criterion		1,593
Sum squared resid	32,282	Schwarz criterion		2,299
Log likelihood	-100,417	Hannan-Quinn criter.		1,879
F-statistic	1,574	Durbin-Watson stat		2,789
Prob(F-statistic)	0,031			

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan pengujian estimasi, digunakannya model *Fixed Effect* pada penelitian ini. Adapun persamaan jika dimasukkan ke dalam persamaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = -1,490 + 5,775 \cdot OtK_{it} + 0,193 \cdot SiLPA_{it} + 3,447 \cdot AkS_{it} + 1,741 \cdot VAB_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan tabel 5 hasil estimasi menunjukkan variabel independen dapat menjelaskan perubahan anggaran belanja bantuan sosial sebesar 30,5 persen berasal dari nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,305493. Sisanya 69,5 persen dijabarkan oleh variabel selain dalam penelitian ini. Pengaruh simultan direpresentasikan oleh probabilitas F sebesar 0,031320 berada di bawah taraf signifikansi 5 persen diperoleh memiliki pengaruh secara bersama terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

Pengaruh variabel secara parsial atau individu dapat diketahui melalui uji t (Iqbal, 2015). Dikatakan memiliki pengaruh jika nilai probabilitas < 0,05. Dihasilkan pada tabel 5 terdapat dua variabel memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dari empat variabel independen. Variabel akumulasi surplus memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0284 < 0,05 artinya akumulasi surplus memengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Varians anggaran belanja menunjukkan nilai probabilitas 0,0204 < 0,05 artinya perubahan anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi varians anggaran belanja. Sedangkan variabel otonomi keuangan menghasilkan nilai probabilitas 0,1387 > 0,05 menunjukkan bahwa otonomi keuangan tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hal yang sama berlaku pada variabel akumulasi surplus dengan nilai probabilitas sebesar 0,1206 > 0,05, perubahan anggaran bantuan sosial tidak dipengaruhi oleh SiLPA.

Hipotesis pertama (H₁) menghasilkan bahwa otonomi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Arza (2023). Pengukuran otonomi keuangan dilihat dari seberapa besar suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Nyatanya, setiap daerah memiliki perbedaan unit administrasi yang lebih maju dan yang tertinggal (Nicolae, 2015). Artinya pendapatan asli daerah yang besar hanya dimiliki oleh unit administrasi yang lebih maju. Bergantungnya terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat masih menjadi suatu masalah di beberapa daerah (Kapidani, 2018). Ketergantungan tersebut menggambarkan dalam menghasilkan potensi penerimaan daerah belum

optimal. Pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Putra & Arza, 2023).

Hasil uji hipotesis kedua (H_2) yaitu SiLPA tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. Terjadinya selisih lebih penerimaan disebabkan karena penganggaran tahun berjalan disusun saat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahun sebelumnya belum usai sehingga tidak bisa diprediksi dan akan terjadi perubahan nilai nominal (Fahrinda, 2022). Hasil tersebut menunjukkan perbedaan temuan dari Putra dan Arza (2023) dan Rafli dan Sari (2021).

Menurut Irfansyah (2020) terbentuknya SiLPA terdiri dari dua komponen yakni pelampauan pendapatan daerah dan sisa (penghematan) belanja. Nilai SiLPA yang besar menandakan ketidaktepatan pemerintah dalam penganggaran sehingga tertundanya pembiayaan pelayanan publik pada tahun berjalan (Amelia & Khoiriawati, 2022). Tidak berpengaruhnya SiLPA terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial menunjukkan besaran nilai SiLPA bukan menjadi acuan untuk merubah anggaran belanja pada tahun berjalan. Penggunaannya sendiri dibatasi adanya mekanisme perencanaan ulang dan bersifat tidak berulang (*once-off*).

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis ketiga (H_3) yaitu perubahan anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh akumulasi surplus sejalan dengan Putra dan Arza (2023). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia terjadinya surplus tidak hanya disebabkan ketika jumlah pendapatan lebih tinggi dari jumlah belanja tetapi ketika pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja. Daerah yang memiliki sumber daya kaya, secara tidak langsung akan memiliki pendapatan asli daerah yang banyak yang akan menciptakan surplus. Terjadinya surplus tidak dapat dipastikan apakah dikarenakan terlalu rendah dalam penetapan akumulasi surplus atau karena adanya perubahan asumsi (Fernando & Sari, 2022). Akumulasi surplus menjadi acuan dalam perubahan belanja bantuan sosial karena adanya SiLPA tahun sebelumnya ditetapkan setelah penetapan anggaran tahun berjalan dan nilai SiLPA tahun berjalan masih bersifat prediksi (Purwanto, 2016). Untuk mencapai tujuan, pemerintah wajib membelanjakan uang publik dengan efisien (Stratan & Manole, 2017). Dengan begitu, penggunaan akumulasi surplus dapat digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan anggaran guna mensejahterakan masyarakat.

Hasil uji menerima hipotesis keempat (H_4) varians anggaran belanja berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial sejalan dengan penelitian Novelsyah *et al.* (2022). Terjadinya varians anggaran belanja disebabkan ketika realisasi belanja kurang dari anggaran (Afifah & Adnan, 2022). Semakin tinggi varians anggaran belanja maka semakin tinggi perubahan anggaran yang mengindikasikan lemahnya *predictive budgeting* atau dengan kata lain penggunaan anggaran belum dilakukan secara optimal.

Varians anggaran belanja dikatakan baik ketika belanja tidak melebihi anggaran. Hal tersebut membuat pemerintah melakukan perubahan anggaran (*rebudgeting*) untuk memastikan sasaran anggaran tercapai. Menurut Junita *et al.* (2018) perubahan anggaran yang dilakukan harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memudahkan dalam proses evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil yang diperoleh. Ketika nominal anggaran belanja sama dengan realisasi belanja artinya anggaran telah digunakan secara baik karena penyusunan anggaran dilakukan dengan tepat. Menurut Park dan Park (2022) varians anggaran terjadi karena ketidakpastian yang terjadi di lingkungan, pemerintah cenderung menghindari risiko dengan menetapkan anggaran yang tinggi dan perbedaan pada pengaturan kelembagaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Terkait dengan analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perubahan anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi secara simultan oleh variabel independen. Secara parsial perubahan anggaran belanja bantuan sosial tidak dipengaruhi oleh otonomi keuangan karena perbedaan wilayah administrasi yang menyebabkan perbedaan pendapatan asli daerah dan masih bergantungnya daerah

tersebut pada dana transfer pemerintah. SiLPA tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial artinya perubahan anggaran belanja bantuan sosial tidak melihat dari besar kecilnya nilai SiLPA. Selanjutnya, akumulasi surplus berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial artinya SiLPA tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi dan sudah diketahui besarnya dapat digunakan untuk melakukan perubahan alokasi anggaran belanja bantuan sosial guna memaksimalkan anggaran. Kemudian anggaran belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh varians anggaran belanja artinya varians belanja tinggi menandakan bahwa penggunaan anggaran belum dilaksanakan secara optimal maka dilakukan perubahan anggaran untuk mengoptimalkan dalam belanja bantuan sosial.

Keterbatasan yang dimiliki pada penelitian ini, seperti objek penelitian yang belum dapat digeneralisasi hanya dilakukan pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2023. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan cakupan wilayah serta periode yang lebih luas dan mampu menambah variabel politik yang diduga dapat memengaruhi perubahan anggaran belanja bantuan sosial.

REFERENSI

- Afifah, S. I., & Adnan, A. (2022). Pengaruh varian anggaran, ukuran pemerintah daerah, dan kapasitas fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 485–498. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21670>
- Amelia, F., & Khoiriawati, N. (2022). Analisis SiLPA sebagai alat ukur pengelolaan APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.141>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Laporan Hasil Pemeriksaan*. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). Electronic Data Processing (SPSS 15 dan EVIEWS 7). In *Danisa Media*. <https://doi.org/10.2307/3008753>
- BPS. (n.d.). *Persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah*. Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Dongi, N. A. L., Sading, Y., Jokolelono, E., Jaya, A. H., & Tuty, F. M. (2024). The role of BAPPEDA in formulating planning and budgeting in intervening in poverty reduction. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(1), 59–67. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.509>
- Fahrinda, Y. dan K. C. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran pada pemerintahan daerah. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 499–456. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369>
- Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Hasibuan, L. S. (2024). Analisis pemberian bantuan sosial pemerintah untuk masyarakat pra sejahtera selama masa pandemi Covid 19 di Kota Medan (studi kasus : Kecamatan Medan Area). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 24(1), 133–141. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.20133>
- Fernando, A., & Sari, V. F. (2022). Pengaruh otonomi keuangan, akumulasi surplus dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap perubahan belanja modal. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 213–231. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.734>
- Florenica, E., & Febriani, R. E. (2023). Do financial deepening, government spending, and unemployment benefit poverty reduction in Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 193–204. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18610>
- Indiahono, D., & Satyawan, D. S. (2023). Perspectives of online news media on extreme poverty and regional budget policy response. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(2), 81–90. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.2.81-90>
- Iqbal, M. (2015). Regresi data panel (2) tahap analisis. *Perbanas Institute*, 1–7.
- Irfansyah, A. (2020). Analisis faktor penyebab SiLPA dan SiLPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 4(1), 57–73.
- Junita, A., Abubakar, E., & Abdullah, S. (2018). The effect of budget variances on the local government budget changes with legislature size as moderator. *Academic Journal of Economic Studies*, 4(1), 162–173.
- Kapidani, M. (2018). A comparative analysis of local government financial autonomy in Albania. *Pressacademia*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2018.790>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Surplus APBD*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-surplus-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>

- Kuntadi, C., & Damayantie, R. T. (2022). Factors affecting budget changes: setting planning, leadership style and government policy. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(5), 670–676. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i05.323>
- Nabilla, Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Analisis perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(1), 35–45.
- Nasution, E. Y. (2023). Pemberian wewenang dan otonomi keuangan daerah di Indonesia: Dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Majelis*, 1, 33–50.
- Niansyah, F. I. W., & Biswan, A. T. (2018). Analisis varians anggaran belanja untuk pengukuran kinerja (studi terapan pada KPP Badan dan Orang Asing). *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(4), 348–363.
- Nicolae, P. A. V. (2015). Theoretical and practical consideration on financial autonomy and balance local budgets in Romania. *Annals of the Constantin Brâncuși II*(1), 231–238.
- Novelsyah, M., Wahyudin Nor, & Rasidah. (2022). Model prediksi perubahan anggaran belanja daerah pada kabupaten kota di Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 15(1), 401–410. <https://doi.org/10.35143/jakb.v15i1.5296>
- Park, H., & Park, J. H. (2022). Citizen participation and budget variance: How does local government make better fiscal accountability? *Lex Localis*, 20(2), 369–392. [https://doi.org/10.4335/10.4335/20.2.369-392\(2022\)](https://doi.org/10.4335/10.4335/20.2.369-392(2022))
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. [https://jogjaprov.go.id/backend/storage/files/shares/Informasi Keuangan Daerah/27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2023.pdf](https://jogjaprov.go.id/backend/storage/files/shares/Informasi%20Keuangan%20Daerah/27.%20Laporan%20Penyelenggaraan%20Pemerintahan%20Daerah%20DIY%20Tahun%202023.pdf)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
- Prasetyo, S. B., Sofianto, A., Febrian, L., Ambarwati, O. C., Widodo, W., Nuriyanto, L. K., & Rosidin. (2023). Rekonstruksi strategi penanggulangan kemiskinan Jawa Tengah: Bukan sekedar bantuan sosial. *Jurnal Hexagro*, 4(1).
- Prasetyo, T. D., Merini, D., & Wulandari, S. (2024). Digitalisasi penyelenggaraan bansos: Studi tentang strategi dan tantangan di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 71–86. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i1.786>
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 87–96.
- Putra, R. D., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh otonomi keuangan, akumulasi surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap perubahan anggaran belanja bantuan sosial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 936–951.
- Rachmadani, W. S., Suhardjanto, D., Setiawan, D., & Rosadi, S. (2024). COVID-19 budget refocusing: Evidence from Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 3(3), 236–249.
- Rafli, M. N., & Sari, V. F. (2021). Pengaruh PAD, SiLPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 486–500.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rainer, P. (2023). *Distribusi Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau/Area*. Goodstats Data.
- Ramadhan, F., Abdullah, S., Karo-karo, S. S., & Priantana, R. D. (2021). Determinan perubahan anggaran belanja daerah (sebuah bukti empiris). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12, 155–166. <https://doi.org/doi/10.22373/jep.v12i2.733>
- Ratifah, I., & Nuraeni, P. (2021). Influence of fiscal stress and legislature size on expenditure change. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 59–64. <https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.4248>
- Rizqiyati, C., Dedy Perdana, H., & Setiawan, D. (2019). Determinan perubahan anggaran belanja modal. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 83–96. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15140>
- Saksono, E. H. (2021). Pengaruh bantuan sosial tunai terhadap konsumsi rokok rumah tangga miskin di Provinsi Lampung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 483–490.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2606–2614. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5389>
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi Minitab Untuk Statistisi Pemula* (1st ed.). Gemala. <https://www.rhttps://www.researchgate.net/publication/359053660ication/359053660>
- Stratan, A., & Manole, T. (2017). Program and performance based budgeting – way towards consolidating local financial autonomy. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 39(4), 490–509. <https://doi.org/10.15544/mts.2017.34>
- Supratiyongsih, L., & Yuliarmi, N. N. (2022). Pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 1. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p01>
- Uğurlu, S. (2024). Do investments have an impact on reducing poverty? ARDL approach. *Akademik Araştırmalar*

- ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 16(30), 121–137. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.1437867>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Haekal, M. D. F. (2022). Determinan faktor sosial dan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(11), 1357–1367.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi*. EKONISIA.
- Widyaningrum, W., Setiawan, D., & Brahmana, R. K. (2019). Factors affecting rebudgeting in local government: from organizational feature to political variables. *International Journal of Economics and Management*, 13(1), 139–152.
- Zhang, J., Ding, T., & Ma, L. (2024). Identification and prediction of the degree of multidimensional returning to poverty risk for the household in China through the novel hybrid model: Based on the survey data of China Family Panel Studies (CFPS). *Heliyon*, 10(21), e38783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38783>